


LAMPIRAN

Nomor Induk Kependudukan : 3374104508190002
Personnel Registration Number

DRAFT



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [redacted]
By virtue of Birth Certificate Number [redacted]
menurut stblg [redacted]
in accordance with state gazette [redacted]
bahwa di [redacted] pada tanggal [redacted]
that in [redacted] on date [redacted]
[redacted] tahun [redacted] telah lahir [redacted]
on year [redacted] was born [redacted]

anak ke [redacted]
child no [redacted]

PEREMPUAN
FEMALE

Kutipan ini dikeluarkan KOTA [redacted]
The excerpt is issued [redacted]
pada tanggal [redacted]
on date [redacted]

Kepala [redacted]
Head of [redacted]

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

NIP. [redacted]

Warga Negara INDONESIA

Nomor Akta : ...
NIK : ...

Pada hari ini _____ Kamis _____ tanggal _____ tahun _____
 _____ hadir dihadapan saya _____
 Kepala _____ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota _____ seorang
 pelapor bernama _____ NIK _____
 umur _____ tahun, pekerjaan _____ alamat tempat tinggal _____
 _____ RT _____ RW _____ Desa/Kelurahan _____
 _____ Kecamatan _____ Kabupaten/Kota _____
 KOTA _____ Provinsi _____

dengan membawa persyaratan :

1. Surat Kelahiran dari Dokter/ bidan/ Penolong
2. Kartu Keluarga (KK) Pengampu
Melaporkan bahwa di _____ pada hari _____ tanggal _____ tahun _____
_____ telah lahir seorang anak bernama _____
_____ dari _____
NIK _____ umur _____ tahun pekerjaan _____
Alamat tempat tinggal _____ RT _____ RW _____ Desa/Kelurahan _____
Kecamatan _____ Provinsi _____ Kabupaten/Kota _____
dan _____ NIK _____
umur _____ tahun pekerjaan _____ RT _____ RW _____
alamat tempat tinggal _____
Kecamatan _____ Provinsi _____
Kabupaten/Kota _____
kelahiran ini disaksikan oleh _____ NIK _____

Setelah akta kelahiran ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh pelapor dan saya.

Tanda tangan
pelapor

*

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KOTA [REDACTED]
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Website : [REDACTED] - Email : [REDACTED] dan [REDACTED]
Kode Wilayah : [REDACTED]

No. Pendaftaran :
Tanggal Pendaftaran :

FORMULIR PENCATATAN KELAHIRAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

I. DATA PELAPOR

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED]
2. Nama Lengkap [REDACTED]
3. Umur [REDACTED] Tahun
4. Pekerjaan [REDACTED]
5. Alamat [REDACTED] RT [REDACTED] RW [REDACTED]
Kode Pos [REDACTED] Telepon [REDACTED]
Desa/Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]
Kabupaten/Kota [REDACTED] Provinsi [REDACTED]

6. Hubungan dengan anak ☒ 1. Ayah ☐ 2. Ibu ☒ 3. Kuasa

Melaporkan bahwa telah lahir :

II. DATA ANAK

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED]
2. Nama Lengkap [REDACTED]
3. Jenis Kelamin ☒ 1. Laki-laki ☐ 2. Perempuan
4. Tempat Lahir [REDACTED]
5. Hari, Tanggal Kelahiran Hari [REDACTED] Tgl. [REDACTED]
6. Pukul / Jam [REDACTED]
7. Jenis Kelahiran ☒ 1. Tunggal ☐ 2. Kembar Sebutkan
8. Anak ke [REDACTED]
9. Tempat Kelahiran ☒ 1. Rumah Sakit ☐ 2. Puskesmas ☐ 3. Rumah Bersalin
4. Rumah ☐ 5. Lainnya (Sebutkan)
10. Penolong Kelahiran ☒ 1. Dokter ☐ 2. Bidan
3. Dukun ☐ 4. Lainnya (Sebutkan)
11. Berat Bayi [REDACTED] Kg
12. Panjang Bayi [REDACTED] Cm

III. DATA IBU

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED]
2. Nama Lengkap [REDACTED]

IV. DATA AYAH

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED]
2. Nama Lengkap [REDACTED]

V. DATA SAKSI :

DATA SAKSI I

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED]
2. Nama Lengkap [REDACTED]



PEMERINTAH KOTA [REDACTED]
DINAS SOSIAL
[REDACTED]

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENERIMA MANFAAT

NO : [REDACTED]

Pada hari ini Senin tanggal [REDACTED] bulan [REDACTED] Tahun Dua
Ribu [REDACTED], yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama [REDACTED]
NIP [REDACTED]
Pangkat/Gol. [REDACTED]
Jabatan [REDACTED]
Unit Organisasi [REDACTED]
Bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama [REDACTED]
NIP [REDACTED]
Pangkat/Gol. [REDACTED]
Jabatan [REDACTED]
Unit Organisasi [REDACTED]
Bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** seorang penerima manfaat :

Nama [REDACTED]
Tempat / tanggal lahir [REDACTED]
Umur [REDACTED]
Alamat [REDACTED]

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penerima manfaat dengan memperhatikan beberapa ketentuan sesuai PP No 44 Tahun 2017 :

1. Pasal 5 : Dalam hal Lembaga Asuhan Anak tidak berlandaskan agama maka pelaksanaan Pengasuhan Anak harus memperhatikan agama yang dianut Anak yang bersangkutan.
2. Pasal 35 ayat 1 : Pengasuhan di dalam Panti Sosial merupakan upaya terakhir dan bersifat sementara sampai dengan dilakukan pengasuhan yang permanen.
3. Pasal 35 ayat 2 : Selama Anak berada di dalam Panti Sosial, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial harus melakukan Asesmen dan rencana pengasuhan yang memungkinkan Anak direunifikasi kepada Keluarganya sesegera mungkin.
4. Pasal 35 ayat 3 : Dalam hal reunifikasi Keluarga tidak berhasil, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak mengupayakan Keluarga pengganti.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
[REDACTED]

Saksi I
[REDACTED]



Pihak Pertama
[REDACTED]

Saksi II
[REDACTED]

POLRI DAERAH



SURAT KETERANGAN

Nomor :

— Pada hari ini tanggal pukul WIB, telah datang seorang Laki-laki / Perempuan yang belum dikenal mengaku sebagai berikut :

Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

NIK / No. Telp :

— Pelapor datang ke melaporakan tentang penitipan bayi perempuan dengan Tempat / Tanggal Lahir, Umur : dan Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penerima Manfaat No: Terhadap yang beralamat di

— Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Relapor

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021
SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 TRIWULAN II

12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Rumus		
12.1	Kepemilikan E-KTP	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki KTP-el} / (\text{Juml wajib ktp} - \text{Jml blm rekam})}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP-el}}$	$X 100\% =$	$\frac{1.163.538}{1.216.000} \times 100\% = 95,69\%$
12.2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	$\frac{\text{Jumlah bayi 0-1 th berakte kelahiran}}{\text{Jumlah kelahiran (april-juni 19)}}$	$X 100\% =$	$\frac{21.307}{22.375} \times 100\% = 95,23\%$
12.3	Rasio pasangan non muslim berakte nikah (%)	$\frac{\text{Jumlah pasangan non muslim berakte perkawinan}}{\text{Jumlah perkawinan}}$	$X 100\% =$	$\frac{505}{507} \times 100\% = 100\%$
12.4	Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk berakte kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}}$	$X 100\% =$	$\frac{1.324.303}{1.668.578} \times 100\% = 79,37\%$
12.5	Rasio penduduk berakte kematian (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk berakte kematian}}{\text{Jumlah kematian}}$	$X 100\% =$	$\frac{3.390}{3.957} \times 100\% = 85,67\%$
12.6	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki KIA}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-16 tahun}}$	$X 100\% =$	$\frac{119.141}{443.093} \times 100\% = 26,89\%$

Semarang, Juli 2019
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Drs. ADI TRI HANANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196111011985031007

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau tidak didokumentasikan.
- II. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik)
.....
.....
- III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan **Pemberitahuan Tertulis** atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**.

PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

- IV. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kembang Raya Nomor 3 Telp. (024) 6712563 Fax (024) 6707203 Call Center/SMS (024) 6712563 SEMARANG Kode Pos 50161
Website : www.diskendukcapil.semarangkota.go.id Email : diskendukcapil@semarangkota.go.id
Disk Capil Kota Semarang @DUKCAPILKOTASMG 085641604903

Nomor : 091/2835.



KEPADA
YTH. ELIA ALVINA SANTO

SEMARANG.





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kanguru Raya Nomor 3 Telp. (024) 6712563 Fax. (024) 6707203 SEMARANG Kode Pos 50161
Website : www.dispendukcapil.semarangkota.go.id - Email : dispendukcapil@semarangkota.go.id dan dukcapilkotasmg@gmail.com
 [disdukcapilsemarang](https://www.instagram.com/disdukcapilsemarang)  [@dukcapilsemarang](https://twitter.com/dukcapilsemarang)  085641604903

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071 / 2835.

1. Dasar : Surat Kepala Program Studi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang Nomor : 00056/ B.3.2 / PSIH / 10 / 2019 tanggal 4 Oktober 2019, perihal Permohonan Ijin Penelitian.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami menerangkan bahwa :
N a m a : ELLA ALVINA SANTOSO
NIM : 16.C1.0015
Prodi : Ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang
Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul : " Pemenuhan Hak Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Ditinjau dari Pasal 27 Ayat 4 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ".
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Oktober 2019

A.n KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG
Sekretaris

HASTO NIKMAHONO, SH
Pria Tingkat I

081396303311992021001

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
2. Peringgal.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



SURAT-KETERANGAN

Nomor : B/SK/ 31 /XI/YAN.2.4./2019/Reskrim

----- KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan : -----

----- Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Nomor : 00055/B.3.2/PSIH/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019 perihal Surat Pengantar Ijin Pra Riset.

Nama : ELLA ALVINA SANTOSO
NIM : 16.C1.0015

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"**.

----- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-----

Semarang, 6 November 2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
KASAT RESKRIM

u.b.
WAKA





RUMAH AIRA

Tempat Singgah & Panti Asuhan Ramah Anak

Jl. Kaba Timur No. 14 RT 09 RW 13 Kel. Tandang
Kec. Tembalang - Semarang HP. 082135249610 - 085786665359

Nomor : 026/RmhAira/P-X/2019
Lamp : -
Perihal : Surat Balasan Permohonan Penelitian

KepadaYth.
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Komunikasi
Unika Soegijapranata
Di
Semarang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Soegijapranata di Semarang Nomor 00082/B.32/PSIH/10/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 Perihal Pemenuhan Hal Anak yang tidak diketahui orang tuanya untuk mendapatkan akte kelahiran di Tinjau dari Pasal 27 ayat 4 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 th 2002 tentang perlindungan anak, atas nama mahasiswa :

Nama : Ella Alvina Santoso
NIM : 16.C1.0015
Program Study : Ilmu Hukum

Kami memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian dengan judul : Pemenuhan Hal Anak yang tidak diketahui orang tuanya untuk mendapatkan akte kelahiran di Tinjau dari Pasal 27 ayat 4 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 th 2002 tentang perlindungan anak

Demikian surat ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Semarang, 06 Oktober 2019
Yayasan Rumah Aira,



Widodo, S.Akun
Ketua

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG

NOTA - DINAS

Nomor : B/ND- 500 / X /YAN.2.4/2019/Sumda

Kepada : Yth. Kasatreskrim Polrestabes Semarang

Dari : Kepala Bagian Sumber Daya

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

1. Rujukan :

- a. Surat dari Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Nomor : 00055/B.3.2/PSIH/10/2019 tanggal 04 Oktober 2019 perihal Surat Pengantar Ijin Pra Riset;
- b. Disposisi Wakapolrestabes Semarang tanggal 10 Oktober 2019 yang berbunyi "proses lanjut".

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dengan ini dimohon kepada KA, untuk membantu pelaksanaan kegiatan penelitian bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, atas nama :

NAMA : ELLA ALVINA SANTOSO
NIM : 16.C1.0015
Judul : Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Semarang, 14 Oktober 2019
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA

Tembusan :

1. Kapolrestabes Semarang.
2. Wakapolrestabes Semarang.

SULASNO, S.Pd.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69050538

**6.1%** PLAGIARISM
APPROXIMATELY**1.23%** IN QUOTES

Report #10072630

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pembuatan akta kelahiran bagi seseorang, khususnya seorang anak, merupakan sebuah bentuk tanggung jawab Negara dalam hal pengakuan atas status kewarganegaraan dan keperdataan seseorang. Negara berkewajiban dalam hal pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran. Hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran diatur dalam Pasal 7 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa: Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan, dan, sejauh memungkinkan, berhak mengetahui orang tuanya dan dipelihara oleh orang tuanya. Akta kelahiran anak di Indonesia telah digunakan sebagai syarat agar dapat mendapat berbagai fasilitas dasar, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dalam hal kesehatan, akta kelahiran dijadikan syarat untuk si anak mendapatkan jaminan kesehatan, misalnya dalam bentuk BPJS. Sedangkan dalam hal pendidikan, akta kelahiran menjadi syarat utama dalam pendaftaran sekolah anak dan syarat bagi anak untuk mendapatkan bantuan pendidikan misalnya dana BOS atau jenis beasiswa lainnya. Dengan demikian akta kelahiran merupakan syarat utama dalam terselenggaranya hak anak terhadap pendidikan. Tanpa adanya identitas diri dalam bentuk akta kelahiran, anak tidak dapat mendaftar ke sekolah dan tujuan Negara dalam bidang